

## PERENCANAAN BERBASIS DATA UNTUK PENINGKATAN CAPAIAN SPM PENDIDIKAN

Marianus Rasmala Janu, Bapperida Provinsi NTT

### Ringkasan Eksekutif

Data Rapor Pendidikan menunjukkan capaian Indeks SPM Pendidikan Provinsi NTT selama tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan, dari 38,18 pada tahun 2023 menjadi 60,71 pada tahun 2025. Meski demikian, secara kategori Indeks SPM NTT masih bergerak di level paling bawah, yaitu kategori capaian Belum Tuntas sampai Tuntas Muda. *Policy Brief* ini menemukan beberapa permasalahan, yaitu: capaian Indeks SPM Pendidikan 22 Kabupaten/Kota yang sebagian besar masih rendah dan capaian indikator pembentuk Indeks SPM Pendidikan Provinsi yang perlu peningkatan. Indikator tersebut di antaranya adalah: APS usia 16-18 tahun, APS usia 4-18 penyandang disabilitas dan kemampuan literasi jenjang pendidikan kewenangan Provinsi. *Policy Brief* ini merekomendasikan beberapa hal, antara lain: penguatan perencanaan program/kegiatan pendidikan yang berbasis data melalui rapor pendidikan, pemetaan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan serta sinergitas berbagai skema pembiayaan pendidikan mulai dari tingkat Pusat hingga Provinsi dan Kabupaten/Kota.

*Kata kunci: SPM Pendidikan, perencanaan, program, prioritas, rapor pendidikan*

### Pendahuluan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bidang pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh warga negara secara minimal. Khusus untuk pelayanan dasar bidang pendidikan, Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 menetapkan indikator komprehensif mulai dari akses hingga mutu pendidikan yang kemudian membentuk Indeks SPM Pendidikan.

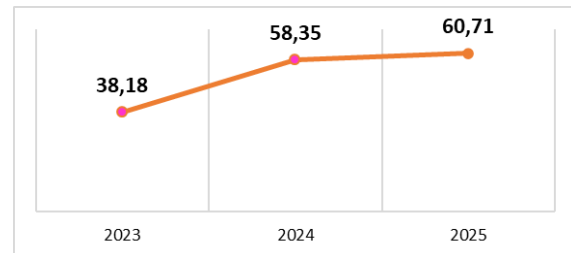
Indikator-indikator pembentuk Indeks SPM Pendidikan disusun untuk menjawab arah kebijakan pendidikan yaitu: meningkatnya angka partisipasi siswa, hasil pembelajaran yang berkualitas dan distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik yang diukur dengan indikator-indikator antara lain, yaitu: literasi, numerasi, iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas. Untuk mengukur tingkat capaian SPM, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 membagi 6 kategori capaian SPM, yaitu: Tuntas Paripurna dengan nilai 100, Tuntas Utama dengan nilai 90 - 99, Tuntas Madya dengan nilai 80 - 89, Tuntas Pratama dengan nilai 70 -

79, Tuntas Muda 60 - 69 dan Belum Tuntas < 60.

Selama tiga tahun terakhir, capaian Indeks SPM Pendidikan Provinsi NTT terus mengalami peningkatan dari 38,18 pada tahun 2023 menjadi 60,71 pada tahun 2025 sebagaimana tampak pada Gambar 1.1. Meski mengalami kenaikan, secara kategori capaian Indeks SPM NTT masih bergerak di level paling bawah, yaitu kategori Belum Tuntas sampai Tuntas Muda. Kondisi ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu: capaian Indeks SPM Pendidikan 22 Kabupaten/Kota yang sebagian besar masih rendah dan capaian indikator pembentuk Indeks SPM Pendidikan Provinsi yang perlu peningkatan. Merujuk pada kondisi tersebut, diperlukan intervensi program/kegiatan pendidikan yang tepat dan benar-benar menysasar kepada akar permasalahan SPM Pendidikan Provinsi NTT. Hal ini dapat dilakukan melalui menemukan akar masalah berdasarkan data dan fakta yang dapat diakses melalui platform Rapor Pendidikan, sehingga menghasilkan perencanaan berbasis data dan bukti.

Data indikator Indeks SPM Pendidikan yang disajikan dalam platform Rapor Pendidikan merupakan agregasi dari berbagai sumber, mulai dari hasil Asesmen Nasional (AN) hingga Data Pokok Pendidikan (DAPODIK). Basis data ini dapat menjadi dasar kuat untuk proses perencanaan intervensi program/kegiatan bidang pendidikan. Perencanaan program/kegiatan pendidikan yang tepat sasaran menjadi urgen mengingat Visi Kepala Daerah Provinsi NTT tahun 2025-2030: “NTT Maju, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berkelanjutan”, yang kemudian diterjemahkan ke dalam 5 Misi Pembangunan. Misi ke-3 menysasar pada urusan pendidikan, yaitu: Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipasi dan tepat sasaran (CERDAS).

**Grafik 1. Capaian SPM Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2023-2025**



Nilai	Kategori
100	Tuntas Paripurna
90-99	Tuntas Utama
80-89	Tuntas Madya
70-79	Tuntas Pratama
60-69	Tuntas Muda
<60	Belum Tuntas

Sumber: Data diolah, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

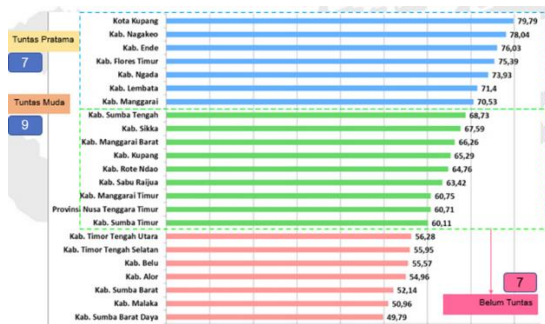
### Deskripsi Masalah

Penyebab yang ditengarai mempengaruhi rendahnya capaian Indeks SPM Pendidikan Provinsi NTT di antaranya yaitu:

#### **Capaian Indeks SPM Pendidikan 22 Kabupaten/Kota yang sebagian besar masih rendah**

Pada tahun 2025 terdapat 7 Kabupaten yang capaian Indeks SPM Pendidikannya masih berada pada kategori Belum Tuntas, sementara itu 8 Kabupaten mendapat kategori Tuntas Muda dan Kota Kupang bersama 6 Kabupaten lainnya berada pada kategori Tuntas Pertama. Capaian Indeks SPM Pendidikan 22 Kabupaten/Kota tentu saja dipengaruhi oleh capaian indikator pembentuk pada jenjang pendidikan kewenangan Kabupaten/Kota, yaitu Pendidikan Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

**Gambar 2. Indeks SPM Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2025**



Sumber: Data diolah, Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

**Masih terdapat beberapa indikator SPM Pendidikan Provinsi NTT yang capaiannya memerlukan peningkatan.**

Indeks capaian SPM Pendidikan Provinsi NTT masih berada pada kategori Tuntas Muda karena terdapat beberapa indikator pembentuk yang capaiannya masih rendah. Dari 9 indikator prioritas SPM Pendidikan Provinsi, indikator Angka Partisipasi Sekolah capaiannya masih rendah baik pada rentang usia 16-18 tahun maupun usia 4-18 tahun untuk penyandang disabilitas. Sedangkan capaian indikator Kemampuan Literasi dan Numerasi masuk pada kategori sedang untuk semua jenjang pendidikan kewenangan Provinsi, sebagaimana tampak pada Tabel 1.1. Indikator-indikator prioritas tentu saja dibentuk oleh beberapa sub indikator yang saling berkaitan. Dalam platform rapor pendidikan sub indikator ini dapat ditelusuri capaiannya dan dikelompokkan sebagai akar masalah.

**Tabel 1. Capaian Indikator Prioritas SPM Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2025**

Indikator Prioritas	SMA Umum	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Kemampuan Literasi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Kemampuan Numerasi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
Penyerapan Lulusan SMK		Sedang			
Kepuasan Dunia Kerja terhadap Kompetensi Lulusan		Baik			
Kualitas Pembelajaran	Baik	Baik	Sedang	Sedang	Sedang
Iklim Keamanan Satuan Pendidikan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Iklim Kebhinekaan	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Iklim Inkusifitas	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18		Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas		
Angka Partisipasi Sekolah	Rendah		Rendah		

Sumber: Rapor Pendidikan Provinsi NTT, 2025

### Kebijakan yang disasar

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 22 Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT Tahun 2025-2029.
4. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22 Kabupaten/Kota dan Provinsi NTT.

### Rekomendasi Kebijakan

1. Berdasarkan kondisi aktual dan identifikasi akar masalah rendahnya capaian Indeks SPM Pendidikan Provinsi NTT, maka beberapa rekomendasi kebijakan kepada Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Pembangunan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota di NTT, yaitu:
2. Perencanaan berbasis data; Penyusunan perencanaan program/kegiatan khususnya bidang pendidikan idealnya mesti berbasiskan data yang valid sehingga perencanaan dapat diimplementasikan tepat sasaran untuk peningkatan SPM pendidikan Provinsi



NTT. Dinas Pendidikan bersama unsur perencanaan dan penganggaran Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota dapat memanfaatkan platform rapor pendidikan sebagai salah satu instrumen perencanaan berbasis data. Tools identifikasi akar masalah dalam rapor pendidikan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi dan tantangan pendidikan di NTT. Hasil refleksi atas akar masalah pada masing-masing indikator selanjutnya menjadi acuan dalam menetapkan prioritas program dan target capaian dalam tahapan perencanaan bidang pendidikan. Hal ini mesti menjadi sebuah *mainstream* dalam setiap proses perencanaan bidang pendidikan baik pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di NTT.

3. Pemetaan strategi; Pemetaan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan perlu dilakukan sebagai bagian dari pemetaan akar masalah, penetapan prioritas program/kegiatan dan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini dapat dilaksanakan melalui: a). pemetaan komprehensif terhadap potensi sekolah, seperti distribusi guru, fasilitas dan kinerja sekolah secara terbaru; b). peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan secara berjenjang berbasis prioritas kebutuhan kompetensi sesuai hasil pemetaan; dan c). kolaborasi dengan berbagai

*stakeholder*, misalnya melibatkan komunitas lokal dalam mengatasi angka putus sekolah melalui pendekatan budaya dengan meningkatkan partisipasi dan peran tokoh adat dalam sosialisasi pendidikan.

4. Sinergi pembiayaan; Sebagaimana diketahui bahwa SPM Pendidikan mendapatkan intervensi penganggaran melalui berbagai skema pembiayaan, seperti: Biaya Operasional Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU) *block grant & specific grant*, Dana Insentif Fiskal (DIF), maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semua skema pembiayaan tersebut mesti dimanfaatkan secara optimal, efisien dan saling melengkapi. Tumpang tindih alokasi atau bahkan kekurangan pembiayaan pada sektor tertentu dapat dihindari dengan adanya koordinasi yang baik sejak tahapan perencanaan baik antara Pemerintah Provinsi dengan Pusat, maupun Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota. Perencanaan yang terpadu perlu ditingkatkan untuk memetakan kebutuhan prioritas sebagai hasil dari identifikasi masalah SPM Pendidikan, sehingga dapat mengarahkan masing-masing skema pendanaan pendidikan sesuai fungsi dan tepat sasaran.